

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

Keamanan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Aparat Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Jumlah Aparat Pamong Praja** adalah banyaknya anggota satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- **Aparat Pamong Praja** adalah aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- **Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)** adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

RUJUKAN

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

-

UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Mengetahui banyaknya aparat satpol pp di kab/kota

INTERPRETASI

Semakin banyak aparat Pamong Praja di suatu daerah, maka akan tercipta suatu kondisi lingkungan yang kondusif.

KETERANGAN

- Jumlah Satpol PP pada masing-masing provinsi ditentukan berdasarkan total skor yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan skor pada masing-masing daerah. Penghitungan skor dihitung

berdasarkan kriteria yang terdiri dari kriteria umum dan kriteria teknis. Masing-masing kriteria terdiri atas indikator-indikator yang kemudian indikator tersebut terbagi dalam 3 (tiga) interval yang menunjukkan interval terendah, menengah dan tertinggi.

- Kriteria umum terdiri atas indikator-indikator umum daerah yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD (Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah), dan rasio belanja aparatur. Kriteria umum ini mempunyai total bobot nilai dua puluh persen (20%). Kemudian kriteria teknis terdiri atas indikator-indikator teknis daerah yaitu klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, kondisi geografis, aspek karakteristik daerah, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, dan jumlah kabupaten/kota. Pada kriteria teknis ini mempunyai total bobot nilai sebesar delapan puluh persen (80%).
- Masing-masing interval pada indikator mempunyai skala nilai. Besaran skala nilai tersebut adalah :
 - Terendah mempunyai skala nilai 400;
 - Menengah mempunyai skala nilai 700; dan
 - Tertinggi mempunyai skala nilai 1.000.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

